

**STRATEGI INTERNASIONALISASI DALAM UPAYA DEKOLONISASI
KALEDONIA BARU OLEH KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN**

(Skripsi)

Oleh

UMMI NIDA AFIFA

NPM 2116071072



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI INTERNASIONALISASI DALAM UPAYA DEKOLONISASI KALEDONIA BARU OLEH KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN

Oleh

UMMI NIDA AFIFA

Kaledonia Baru merupakan wilayah dengan status sui generis di bawah naungan Prancis, namun perjuangan menuju dekolonisasi masih menghadapi hambatan besar. Referendum kemerdekaan yang diadakan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil mayoritas penduduk memilih untuk tetap bersama Prancis. Hal ini mendorong kelompok pro-kemerdekaan untuk menginternasionalisasikan isu dekolonisasi guna mendapatkan dukungan global dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam upaya mencapai dekolonisasi Kaledonia Baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis eksplanatif untuk mengkaji bagaimana kelompok pro-kemerdekaan, khususnya Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), memanfaatkan forum internasional dan organisasi kawasan dalam perjuangannya. Teori dekolonisasi digunakan untuk menganalisis strategi yang diterapkan serta bagaimana aktor internasional merespons langkah-langkah yang diambil oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen akademik, wawancara dengan diplomat, serta laporan organisasi internasional yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan melibatkan berbagai aktor, termasuk negara-negara di kawasan Pasifik, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. FLNKS berhasil membawa isu dekolonisasi Kaledonia Baru ke panggung internasional, mendapatkan dukungan dari Melanesian Spearhead Group (MSG), serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis melalui forum multilateral. Namun, dinamika politik domestik serta keberlanjutan keterlibatan Prancis tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi jalannya proses dekolonisasi Kaledonia Baru.

Kata Kunci: Dekolonisasi, Internasionalisasi, Kaledonia Baru, Prancis, Referendum, *Self-Determination*.

ABSTRACT

INTERNATIONALIZATION STRATEGY IN THE DECOLONIZATION EFFORTS OF NEW CALEDONIA BY THE PRO-INDEPENDENCE MOVEMENT

By

UMMI NIDA AFIFA

New Caledonia remains under French sovereignty despite being granted sui generis status, yet its decolonization efforts continue to encounter substantial obstacles. The independence referenda held in 2018, 2020, and 2021 resulted in the majority of the population voting to remain part of France, prompting the pro-independence movement to internationalize the decolonization issue in an effort to garner global support and exert diplomatic pressure on France. This study examines the internationalization strategies employed by the pro-independence group, particularly the Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), in pursuit of New Caledonia's decolonization. Using a qualitative approach with an explanatory analysis method, this research investigates how FLNKS strategically engages international forums and regional organizations to advocate for self-determination while also analyzing the responses of international actors to these efforts. By employing decolonization theory as a framework, this study critically assesses the mechanisms through which the movement seeks legitimacy and external backing. The findings reveal that the internationalization strategy involves a broad spectrum of actors, including Pacific regional states, non-governmental organizations, and international institutions, with FLNKS successfully elevating the issue onto the global stage, securing support from the Melanesian Spearhead Group (MSG), and leveraging multilateral platforms to amplify diplomatic pressure on France. However, despite these efforts, the persistence of domestic political complexities and France's continued strategic presence in the territory remain key challenges that shape the trajectory of New Caledonia's decolonization process.

Keywords: *Decolonization, France, Internationalization, New Caledonia, Referendum, Self-Determination.*

**STRATEGI INTERNASIONALISASI DALAM UPAYA DEKOLONISASI
KALEDONIA BARU OLEH KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN**

Oleh

UMMI NIDA AFIFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: Strategi Internasionalisasi Dalam
Upaya Dekolonisasi Kaledonia Baru
Oleh Kelompok Pro-Kemerdekaan

Nama Mahasiswa

: Ummi Nida Afifa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116071072

Jurusan


: Hubungan Internasional

Fakultas

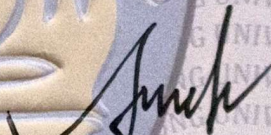
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

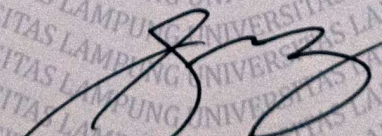

Moh. Nizar, S. IP., M.A.

NIP. 198308 19201504 1 005


Dr. Arie Fitria, S.IP, MT, DEA.

NIP. 19780902 200212 2 007

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

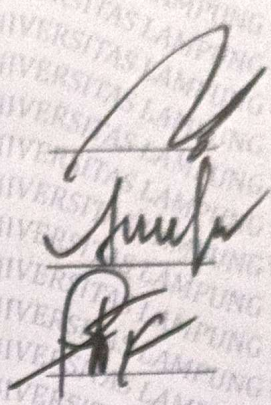
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Moh. Nizar, S. IP., M.A.

Sekretaris : Dr. Arie Fitria, S. IP, MT, DEA.

Penguji Utama : Luerdi. S. IP, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 01 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Umami Nida Afifa
NPM. 2116071072

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah putri bungsu dari Ibu Elly Kasim, S.E., A.Kt., yang dilahirkan pada hari Rabu, 19 Juni 2003, dari keluarga bersuku Minangkabau. Sejak usia dini, penulis telah menapaki jalan pendidikan formal, dimulai dari Taman Kanak-Kanak Bangsa Ratu, SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, penulis telah menaruh harapan besar untuk menjadi seorang duta besar, cita-cita yang kemudian menuntun langkahnya memilih jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, berpartisipasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen hingga berkontribusi aktif dalam organisasi kemahasiswaan, salah satu pencapaian akademik yang membanggakan adalah diraihnya medali perak dalam perlombaan inovasi proyek. Dalam bidang organisasi, penulis memulai perjalanannya di divisi *Human Resource Development* SPEC dan HMJHI, hingga akhirnya dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum HMJHI pada semester lima, sebuah pengalaman yang memperkuat karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Tak berhenti di lingkup kampus, penulis juga merintis pengalaman profesional melalui magang di PT. Angkasa Pura II pada divisi *Human Resources & General Affairs*, dan melanjutkan karier sebagai staf *Human Resources* di Pempek Tenda Biru.

MOTTO

Whoever does even the smallest amount of good will see the result.

(Q.S Al-Zalzalah 99:7)

*At some point, we all have to choose between what the world wants you to be, and
who you are – Natasha Romanoff, Black Widow*

*Faith is my sword. Truth is my shield. Knowledge is my armor – Stephen Strange,
Doctor Strange*

PERSEMBAHAN

Untuk Mama, Kak Dhia, Kak Iip, Mas Dhafi, Kak Roni, Nadja, dan Ayah

Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Internasionalisasi Dalam Upaya Dekolonisasi Kaledonia Baru Oleh Kelompok Pro-Kemerdekaan” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.P.A., selaku Kepala urusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
3. Mas Moh. Nizar, S. IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing utama, beliau telah menjadi sosok yang tak hanya membimbing penulis dalam menjalani proses penelitian ini, tetapi juga dengan penuh kesabaran memberikan arahan serta masukan yang berarti dan membangun, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
4. Mba Dr. Arie Fitria, S.IP, MT, DEA. sebagai Dosen Pendamping Skripsi, beliau telah berperan besar sejak awal pengajuan hingga penyusunan skripsi ini, dengan memberikan arahan yang penuh perhatian serta membantu penulis menemukan topik yang tepat. Tak hanya itu, masukan dan saran tambahan yang beliau berikan menjadi dorongan berharga dalam menyempurnakan dan memperkuat penelitian ini;
5. Pak Luerdi. S. IP, M.A. sebagai Dosen Penguji Skripsi, beliau telah memberikan kontribusi yang begitu berarti melalui saran, masukan, serta kritik yang membangun, yang tidak hanya memperkaya pemahaman penulis terhadap penelitian ini, tetapi juga mendorong penulis untuk menyempurnakannya dengan lebih baik;

6. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dan membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan di Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah menjadi pilar dalam perjalanan akademik saya. Dengan dedikasi, kesabaran, dan ilmu yang diberikan, tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter serta cara berpikir yang kritis dan berwawasan luas. Setiap nasihat dan pembelajaran yang saya terima akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan. Semoga ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang tak terputus;
8. Dan juga staf Jurusan Hubungan Internasional serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam hal pengadministrasian selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Kepada ibunda tercinta, Elly Kasim, sosok yang menjadi surga dan dunia bagi penulis, yang dengan penuh cinta telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan senantiasa mendampingi setiap langkah hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini. Dan juga ayah Abil Kabir yang telah kebersamaan mama dalam mendukung penulis.
10. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Mas Yusuf Kadhafi dan Kak Dhia Fadhilah Fatin, kakak dan kakak ipar pertama yang tidak hanya memberikan dukungan secara finansial, tetapi juga menjadi sandaran batin saat penulis merasa lelah dan rapuh. Kalian selalu hadir untuk mendengar tanpa menghakimi, memberi semangat tanpa diminta, dan menawarkan pelukan hangat di saat dunia terasa berat;
11. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Kak Roni Azhari dan Kak Annisa Rifdatul Marwah, kakak dan kakak ipar kedua yang dengan penuh kasih selalu hadir memberi dukungan tanpa syarat. Di saat penulis berada di titik terendah, pelukan hangat dan kehadiran kalian menjadi penguat yang menenangkan. Tak lupa untuk Nadja Khawla Azzahra, keponakan tersayang, yang dengan senyum polos dan keceriaanmu, mampu

menghapus penat dan membawa terang di hari-hari penulis yang kelabu. Kalian adalah bagian dari cahaya dalam perjalanan ini;

12. Terima kasih yang setulus hati penulis sampaikan kepada M. Sczasimbi Barantis Putra dan A. Dzaky Nurrahman, sahabat sejati sejak awal langkah di dunia perkuliahan, yang telah menjadi tempat ternyaman untuk bersandar, teman seperjuangan dalam suka dan duka, serta sumber kekuatan yang tak tergantikan. Kehadiran kalian telah memberi warna dan makna dalam setiap perjalanan ini dan menjadi rumah bagi penulis. Mereka adalah *my ride or die forever* yang menyimpan seluruh cerita penulis;
13. Daffa Al Ghiffari W.P, Rahma Ghina Hamidah, Firsandini, dan Amanda Dya Putri yang telah menjadi *safe place* bagi penulis dalam segala suka dan duka. Kalian adalah sahabat yang dengan sabar menampung setiap cerita, memberikan pelukan hangat saat penulis menangis, dan hadir di setiap tawa kebahagiaan. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai dalam perjalanan ini;
14. Farhan Alfajri Ramadhan, Eleanor Clara, Heti Bairani, Sondang Angelina Togatorop sebagai sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa mendukung dan memberikan afirmasi positif, terima kasih yang tak terhingga. Tanpa kalian, perjalanan perkuliahan ini akan terasa kosong, tanpa warna, dan tanpa keceriaan. Kalian adalah bumbu penyemangat yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti dan penuh kebahagiaan;
15. Kepada seseorang yang menjadi nama yang tak pernah absen di hati dan tempat pulang paling tenang selain rumah Saudara Abiyu Farras Taufiqurrahman. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah setia menemani, memberi motivasi, serta menjadi sumber kekuatan baik di saat suka maupun duka. Kalian tak pernah lelah memberikan semangat, dukungan, dan pemikiran yang membangun. Terima kasih telah menjadi tempat berlindung di kala penulis merasa lelah, menjadi pendengar yang sabar, penghibur yang setia, dan penasihat yang bijaksana. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai dalam setiap langkah penulis;

16. Sahabat-sahabat seperjuangan baik dalam perkuliahan maupun Presidium Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) yang telah senantiasa menemani, menghibur, mendukung dan menyemangati peneliti, yakni Riezky Sukma Abiastuti, Nazhara Saroja, Robai Jordan Abadi, Anisa Salma, dan Ghaitsya Shofa Az-zahra ;
17. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terkasih sejak masa SMA, Aisyah Ivena Fariza, Silva Ainunnisa, dan Agung Syawal Saputra, yang telah menjadi pelindung saat luka ditorehkan oleh mereka yang pernah menyakiti. Di tengah masa sulit itu, kalian hadir merangkul dengan ketulusan, memberi kehangatan, dan membuktikan arti sahabat sejati. Terima kasih telah tetap berjalan bersama penulis hingga hari ini, menjadi cahaya yang tak pernah padam di sepanjang perjalanan hidup ini.;
18. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2021
19. Terima kasih yang paling utama untuk sosok anak bungsu yang kuat, yakni Ummi Nida Afifa. Terima kasih telah bertahan, meski sering kali ingin menyerah. Terima kasih telah bangkit setiap kali jatuh, tetap melangkah meski dunia terasa berat, dan tetap percaya meski banyak hal tak berjalan sesuai harapan. Untuk segala tangis yang dipendam, senyum yang dipaksakan, dan semangat yang terus dijaga, kamu luar biasa!. Terima kasih sudah tidak berhenti percaya bahwa kamu layak sampai di titik ini..

Bandarlampung, 14 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,

Ummi Nida Afifa
NPM. 2116071072

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Teori Dekolonisasi	15
2.2.2 Teori Paradiplomasi	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Sumber Data.....	21

3.4	Teknik Pengumpulan Data	22
3.5	Teknik Analisis Data.....	22
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1	Gambaran Umum.....	24
4.2	Dinamika Upaya Dekolonisasi Kaledonia Baru	31
4.3	Strategi Internasionalisasi Kelompok Pro-Kemerdekaan	41
4.3.1.	Internasionalisasi Melalui <i>Non-State Actors</i>	41
4.3.2.	Internasionalisasi Melalui <i>State Actors</i>	70
4.4	Respons Prancis Terhadap Strategi Internasionalisasi Oleh Kelompok Pro-Kemerdekaan	77
4.4.1	Penyesuaian Kebijakan Pemilu	77
4.4.2	Pengerahan Pasukan Keamanan.....	78
4.4.3	Penetapan Keadaan Darurat	78
4.4.4	Tuduhan Terhadap Pihak Asing	79
4.4.5	Kunjungan Presiden Emmanuel Macron	79
4.4.6	Merespons Tekanan Internasional.....	80
4.5	Analisis.....	85
4.5.1	Internasionalisasi.....	85
4.5.2	Dalam Dimensi Politik Kaledonia Baru.....	88
4.5.3	Dalam Dimensi Ekonomi Kaledonia Baru.....	89
4.5.4	Dalam Dimensi Sosial Dan Budaya Kaledonia Baru.....	90
	KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1.	Kesimpulan	92
5.2.	Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	96

LAMPIRAN.....	103
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Hasil Pengolahan Data VosViewer (<i>Density</i>).....	14
2.2 Hasil Pengolahan Data VosViewer (<i>Network</i>).....	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
4.1.1 Hasil pemungutan suara referendum kemerdekaan 2018.....	35
4.1.2 Asap selama protes di Noumea pada 15 Mei 2024.	40
4.1.3 Dokumentasi pertemuan PALM di Jepang.	44
4.1.4 Pidato Mark Brown dalam forum PALM.	46
4.1.5 Kedatangan Komite PIF di Noumea.	47
4.1.6 Laporan rutin mengenai progres referendum FLNKS dengan MSG	50
4.1.7 Pidato Roch Wamytan di pertemuan ICJ.	58
4.1.8 Pidato Isabelle Rome di pertemuan Jenewa.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. 1 Rincian Data Penduduk Kaledonia Baru Sebelum Perjanjian Matignon Oudinot 1988.....	26
Tabel 4.1. 2 Rincian Data Penduduk Kaledonia Baru Sesudah Perjanjian Matignon Oudinot 1988.....	26
Tabel 4.1. 3 Rangkuman Undang-Undang Yang Dikeluarkan Prancis Periode 1957 Hingga 1998.....	28

DAFTAR SINGKATAN

BIG	: <i>Baku Initiative Group</i>
C-24	: <i>United Nations Special Committee on Decolonization</i>
FLNKS	: <i>Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste</i>
GNB	: Gerakan Non-Blok
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
IIGO	: <i>International Inter-Government Organizations</i>
INGO	: <i>International Non-Government ORganizations</i>
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
LNC	: <i>Les Nouvelles Calédoniennes</i>
MSG	: <i>Melanesian Spearhead Group</i>
NSGT	: <i>Non-Self-Governing Territory</i>
PALM	: <i>Pacific Alliance Leaders Meeting</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIF	: <i>Pacific Islands Forum</i>
RPCR	: <i>Rassemblement pour la Calédonie dans la République</i>
RNZ	: <i>Radio New Zealand</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
USIP	: <i>The United States Institute of Peace</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merdeka, sebuah kata sederhana yang memiliki cakupan luas. Merdeka bukan hanya sekadar bebas dan terlepas dari jajahan kolonialisme, tetapi memiliki makna bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi dari pihak eksternal (Jansen et al., 2019). Maka, motivasi utama di balik perjuangan untuk kebebasan berakar pada keinginan untuk memperoleh kedaulatan politik dan dapat menentukan nasib sendiri (*self determination*). Meskipun demikian, terdapat pula dimensi lain yang mendorong keinginan untuk merdeka seperti hak atas identitas budaya, hak-hak politik, ekonomi, serta hak asasi. Identitas budaya menjadi pendorong utama bagi negara-negara yang terjajah untuk merdeka karena kolonialisme juga disertai dengan pemaksaan budaya asing kepada penduduk lokal, sehingga banyak negara merasa kehilangan identitas, contohnya banyak negara di benua Afrika (Kumar, R. 2015). Kenya dan Nigeria memperjuangkan kemerdekaan sebagai upaya menghidupkan kembali bahasa, tradisi, dan kebiasaan lokal yang ditekan semasa kolonialisme. Kolonialisme Afrika sendiri dikenal dengan fenomena Perebutan Afrika (*Scramble for Africa*) yang melibatkan tujuh negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis.

Kolonialisme Prancis sebagai salah satu wujud imperialisme yang membawa dampak signifikan bagi perkembangan sejarah global, khususnya di kawasan Afrika, Pasifik dan Asia Tenggara. Selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Prancis membangun kekaisaran kolonial yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, perluasan pengaruh politik, serta penyebaran budaya Prancis. Di berbagai wilayah, termasuk Afrika Barat, Afrika Utara, dan Vietnam, Prancis menerapkan kebijakan asimilasi yang

bertujuan menghapus budaya lokal dan menggantinya dengan budaya Prancis. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ranah budaya, tetapi juga disertai dengan penindasan politik dan sosial terhadap penduduk asli (Webster & Nowell, 2024).

Dalam perjalanan menuju kemerdekaan banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Bahkan, proses menuju kemerdekaan kerap kali menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pengorbanan, baik dari segi kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Kekuatan kolonial yang dihadapi turut menentukan jenis rintangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa terjajah, antara lain: mencakup berbagai aspek: perlawanan militer, represi politik, pemaksaan nilai budaya kolonial, dan eksploitasi ekonomi (Jansen et al., 2019). Kekuatan kolonial, konteks sejarah, serta dukungan internasional juga mendasari berbagai negara untuk memilih cara mencapai kemerdekaan.

Perjuangan dengan jalur non-tradisional atau secara damai juga dapat dilansir dari buku *Decolonization and the Evolution of International Human Rights* karya Roland Burke (Burke, 2010) yang menjelaskan bahwa dekolonisasi sebagai proses di mana negara-negara yang terjajah berjuang untuk mendapatkan kembali kedaulatan mereka dapat diraih melalui jalur damai, seperti negosiasi diplomatik, referendum, dan dialog multilateral. Proses dekolonisasi juga seringkali melibatkan internasionalisasi yang merujuk pada proses di mana isu-isu lokal atau nasional mendapatkan perhatian dan dukungan dari komunitas internasional. Proses ini sering kali melibatkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan keadilan sosial di tingkat global. Proses-proses dekolonisasi tersebut pun telah diakui oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai instrumen untuk menekan kekuatan kolonial agar memberikan kemerdekaan tanpa kekerasan pada 10 Desember 1948 (United Nations, 1948).

Salah satu contoh menarik dalam konteks memerjuangkan kemerdekaan adalah Kaledonia Baru, yang dapat dijadikan pengecualian dari pola umum perjuangan kemerdekaan negara-negara yang merdeka dari

kolonialisme Prancis. Di Kaledonia Baru, Prancis memberikan janji untuk mengadakan referendum (Lois & Decrets, 1998).

Referendum merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suara pada isu-isu tertentu, seperti pengesahan konstitusi atau penentuan nasib politik mereka sendiri (*self-determination*). Melalui proses ini, rakyat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga menciptakan legitimasi dan transparansi dalam sistem politik. Dengan adanya referendum, warga negara dapat mengekspresikan kehendak mereka tanpa intervensi pihak lain, menjadikannya sebagai bentuk partisipasi demokratis yang fundamental.

Perjalanan penggunaan referendum sebagai solusi untuk kemerdekaan ini telah berlangsung melalui beberapa tahap penting di berbagai belahan dunia. Meskipun konsep referendum sudah ada sejak zaman kuno, penerapannya dalam konteks modern muncul di Eropa pada abad ke-19, ketika negara-negara seperti Swiss mulai menggunakan mekanisme ini untuk pengambilan keputusan politik. Pasca perang Dunia II, banyak negara terjajah mulai memperjuangkan kemerdekaan, referendum menjadi salah satu metode yang diakui untuk mengekspresikan kehendak rakyat. Pada 14 Desember 1960, PBB mengadopsi Resolusi 1514 (XV) (United Nations, 1960), yang menegaskan pentingnya hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk melalui referendum sebagai cara untuk meraih kemerdekaan.

Kaledonia Baru, sebuah wilayah yang terletak di Kawasan Oseania memiliki sejarah panjang yang dipenuhi konflik dan perjuangan identitas. Wilayah ini dihuni oleh penduduk asli, Suku Kanak, yang telah mengalami dampak signifikan dari kolonisasi Prancis sejak tahun 1853. Ketika Prancis menganeksasi Kaledonia Baru, bukan hanya tanah yang diambil alih, melainkan penerapan kebijakan yang merugikan suku pribumi, seperti pengenaan pajak yang tidak adil dan menjadikan wilayah Kaledonia Baru sebagai tempat narapidana dari Prancis dengan mengirimkan sekitar 20.000 narapidana dari tahun 1864 hingga 1894 (Chappell, 1999).

Seiring berjalannya waktu, Kaledonia Baru menjadi hunian baru bagi narapidana yang telah dikirimkan yang disebut sebagai *Caldoches*. Pada tahun 1870, terjadi gelombang imigrasi besar-besaran ke Kaledonia Baru, dengan kedatangan lebih dari separuh penduduk Pulau Wallis dan Futuna di Polinesia, serta para imigran dari Eropa, Asia, dan ras Melanesia yang terkucilkan di Eropa, para pendatang tersebut disebut sebagai *settler*. Kehadiran para pendatang mengubah demografi Kaledonia Baru, menjadikan Suku Kanak sebagai minoritas di tanahnya sendiri (Connell, 2021).

Dari fenomena imigran yang terjadi, munculnya gerakan pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh FLNKS (*Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste*) yang menjadi langkah penting dalam perjuangan Suku Kanak untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Sebagai oposisi dari FLNKS, para pendukung Prancis dikenal sebagai kelompok loyalis juga membentuk partai yakni *Rassemblement pour la Calédonie dans la République* (RPCR). Konflik yang berkepanjangan antara pro-kemerdekaan dan loyalis Prancis memuncak dalam serangkaian aksi protes dan kekerasan, yang dikenal sebagai *les événements* (Muchamad, 2018). Sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antar kelompok, Prancis menginisiasi Perjanjian Matignon pada 1988 yang memberikan janji dilaksanakannya referendum kemerdekaan dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang (Fisher, 2024a).

Sebagai bentuk janji yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Matignon bahwasannya akan melakukan referendum kemerdekaan 10 tahun dari tahun 1988, maka dari itu Prancis mengabulkan di tahun 1998. Namun, terdapat perbedaan pandangan dari pro-kemerdekaan (FLNKS) dan loyalis (RPCR) sehingga di tahun 1998 alih-alih dilaksanakan referendum kemerdekaan, Prancis menyelenggarakan Perjanjian Nouméa yang dihadiri oleh Pemerintah Prancis, kelompok Pro-kemerdekaan dan loyalis.

Dalam Perjanjian Nouméa pembukaan 3 menyatakan bahwa penjajahan telah menyerang martabat dan merampas identitas Kanak. Pembukaan 4 menggarisbawahi atas kewarganegaraan Kaledonia Baru yang

memiliki makna bahwasannya baik suku Kanak, *caldoches*, dan *settler* adalah satu kesatuan yakni warga negara Kaledonia Baru. Selain itu, Perjanjian Nouméa menyebutkan dalam pasal 5 mengenai proses penentuan nasib sendiri (*self determination*) akan dimulai pada masa akhir perjanjian yakni di bulan November 2018. Juga perjanjian ini menyebutkan bahwa Prancis menyerahkan sejumlah otoritas selain dari pertahanan, luar negeri, mata uang, hukum dan ketertiban, serta pengadilan. Kaledonia Baru diberikan pula kekuasaan untuk membuat undang-undang sendiri di bidang-bidang yang termasuk ke dalam kekuasaannya, meskipun tetap harus banding ke pengadilan konstitusional Prancis (Pasal 2.1). Hasil dari Perjanjian Nouméa juga berupa sebutan bagi Kaledonia Baru, yakni sebuah wilayah semi-otonom Prancis dengan sebutan *collectivité sui generis* atau CSG (Fisher, 2024a).

Janji yang disebutkan dalam Perjanjian Nouméa diwujudkan dengan diadakannya referendum kemerdekaan pertama di tahun 2018, dimana 43,4 persen memilih untuk merdeka, sementara 56,7 persen lainnya memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Namun, hasil referendum pertama tidak memuaskan kelompok pro-kemerdekaan, yang merasa bahwa partisipasi pemilih yang rendah menjadi alasan untuk mengadakan referendum kedua pada tahun 2020. Dalam referendum kedua, dukungan terhadap kemerdekaan meningkat menjadi 46,74 persen, tetapi tetap kalah dari suara yang memilih untuk tetap bersama Prancis (Fisher, 2024a).

Ketegangan ini berlanjut hingga referendum ketiga pada tahun 2021. Namun, dalam referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan meminta untuk penundaan dari tanggal yang telah ditetapkan oleh Prancis tetapi tidak disetujui, maka dari itu kelompok pro-kemerdekaan memboikot referendum kemerdekaan ketiga tersebut sehingga hasil menunjukkan dukungan yang sangat besar untuk tetap menjadi bagian dari Prancis, dengan suara 96,50 persen dan total partisipasi hanya 43,87 persen dari masyarakat Kaledonia Baru yang memilih (Smith, 2022). Pemboikotan dari kelompok pro-kemerdekaan menyebabkan partisipasi pemilih turun drastis dari referendum pertama total partisipasi menyentuh angka 81,01 persen dan

85,69 persen di referendum kedua.

Hasil dari referendum ketiga memicu reaksi dari kelompok pro-kemerdekaan yang dianggap tidak adil. Maka dari itu, pro-kemerdekaan melalui partai FLNKS mulai menginternasionalisasikan isu mengenai dekolonisasi dan ketidakadilan di forum-forum internasional untuk mencari dukungan dan pengakuan atas hak-hak sebagai penduduk asli. Respons dari forum internasional beragam, dengan mendapat dukungan dari beberapa negara salah satunya negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik Oseania yaitu Fiji, Vanuatu, Papua New Guinie, dan beberapa negara yang tergabung dalam organisasi internasional MSG (Melanesian Spreadhead Group) (Dziedzic & Oaten, 2024) yang mendukung hak *self-determination* bagi Suku Kanak juga menekankan pentingnya stabilitas dan integrasi Kaledonia Baru dalam kerangka Prancis.

1.2 Rumusan Masalah

Perjanjian Nouméa tahun 1998 mengamanatkan penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kaledonia Baru sebagaimana tertera pada artikel 5 yang berbunyi,

“Au terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressée..”

“Pada akhir periode dua puluh tahun, pengalihan kekuasaan kedaulatan ke Kaledonia Baru, akses ke status internasional dengan tanggung jawab penuh dan organisasi kewarganegaraan sebagai sebuah kebangsaan akan diserahkan pada pemungutan suara penduduk yang bersangkutan...”

Perjanjian Nouméa dilaksanakan Prancis dengan menggelar referendum kemerdekaan pertama tahun 2018, Hasilnya, mayoritas suara

masyarakat Kaledonia Baru memilih tetap menjadi bagian Prancis. Walaupun hasil referendum pertama telah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kaledonia Baru memilih untuk tetap berintegrasi dengan Prancis, pemungutan suara tetap dilanjutkan hingga tiga kali. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang diikuti oleh ketertarikan penulis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap politik warga Kaledonia Baru, serta dampak dari referendum yang telah dilaksanakan. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk menitikberatkan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana strategi internasionalisasi oleh pro-kemerdekaan dalam upaya dekolonisasi Kaledonia Baru?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi yang digunakan oleh aktor lokal, khususnya kelompok pro-kemerdekaan dalam memperjuangkan untuk mencapai dekolonisasi dari Prancis.
2. Mengidentifikasi aktor-aktor internasional yang berperan atau memiliki keterlibatan dalam merespons kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara akademis, penulisan ini memberikan kontribusi dalam kajian dekolonisasi dan negosiasi dengan menambah wawasan mengenai dinamika politik, sosial, dan budaya di Kaledonia Baru, khususnya terkait strategi dan tantangan yang dihadapi oleh Suku Kanak dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas dalam konteks kolonialisme.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan studi yang menjadi referensi utama dalam memahami informasi, wawasan, teori, serta konsep yang terkait dengan topik yang ditulis. Penulisan ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang membantu dalam mendukung analisis, terutama untuk mengidentifikasi unsur kebaruan, termasuk konsep atau teori yang akan diterapkan dalam menganalisis isu ini. Dalam penulisan ini memiliki spesifikasi terhadap penolakan kemerdekaan penduduk Kaledonia Baru dari Prancis yang dilihat melalui referendum kemerdekaan di tahun 2018, 2020, dan 2021 yang mana belum ada yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang membuat penduduk Kaledonia Baru menolak kemerdekaan yang Prancis tawarkan dengan melihat dari hasil *voting* pada referendum kemerdekaan yang telah dilaksanakan tiga kali tersebut. Akan tetapi, terdapat sejumlah penelitian terkait dengan topik ini yang telah dilakukan oleh para peneliti lain.

Penelitian pertama merupakan penelitian dari Denise Fisher yang berjudul “*New Caledonia’s Self-Determination Process*” (Fisher, 2024a), Penelitian Fisher membahas mengenai proses panjang Kaledonia Baru menuju penentuan nasibnya sendiri dan masa depan politiknya dalam konteks hubungan dengan Prancis. Penelitian ini fokus pada sejarah perjuangan kemerdekaan oleh penduduk asli Suku Kanak, termasuk peran Prancis dalam pengaturan otonomi wilayah tersebut sejak tahun 1853. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses referendum kemerdekaan yang dilakukan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 serta bagaimana proses tersebut mencerminkan ketegangan etnis antara pro-

kemerdekaan dan kelompok kontra. Fisher menyoroti bahwa pentingnya perjanjian Nouméa yang memberikan hak-hak politik yang lebih luas kepada penduduk asli dan merumuskan kerangka untuk menggelar referendum kemerdekaan Kaledonia Baru. Fisher juga membahas dampak ekonomi dari industri nikel yang menjadi sumber konflik utama antara pro-kemerdekaan dan kelompok kontra.

Penelitian kedua merupakan penelitian dari Chris Green yang berjudul *“Re-Collecting Kanaky: The Power of the Past in the Independence Politics”* (Green, 2023). Penelitian Green berfokus pada peran sejarah dan identitas dalam politik kemerdekaan Suku Kanak (Kaledonia Baru). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemimpin Kanak, Jean-Marie Tjibaou, menggunakan institusi budaya seperti museum sebagai alat politik dalam perjuangan kemerdekaan dari Prancis. Dalam konteks tersebut, museum dilihat sebagai tempat penting untuk membentuk kembali identitas Kanak dan melawan kolonial Prancis. Penelitian Green juga menyoroti keterbatasan museum sebagai alat dekolonisasi yang efektif. dengan menelusuri dinamika kolonial dan anti kolonial yang tersimpan di museum Nouméa dan Hienghène. Penelitian Green berupaya menjawab pertanyaan tentang pentingnya mengumpulkan kembali masa lalu untuk kepentingan masa kini dan apakah museum bisa menjadi situs revolusi politik.

Penelitian ketiga merupakan penelitian dari John Connell yang berjudul *“The 2020 New Caledonia Referendum: The Slow March to Independence?”* (Connell, 2021). Penelitian Connell berfokus pada referendum kemerdekaan Kaledonia Baru pada tahun 2020 yang melewati proses panjang menuju kemungkinan kemerdekaannya dari Prancis. Penelitian ini membahas latar belakang referendum kedua yang diadakan pada 4 Oktober 2020. Hasil referendum kedua menunjukkan mayoritas penduduk memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis meskipun ada peningkatan dukungan terhadap kemerdekaan dari 43,4 persen ada referendum 2018 menjadi 46,74 persen. Penelitian Connell menyoroti perpecahan yang tajam antara penduduk pribumi Kanak yang mendukung

kemerdekaan dan penduduk Eropa serta loyalis lainnya yang memilih stabilitas dan mempertahankan status quo. Penelitian ini juga mengulas konflik historis antara Kanak dan pemukim Eropa, serta bagaimana perjanjian Matignon dan Noumea, berupaya mencapai "takdir bersama" untuk semua warga Kaledonia Baru. Meskipun beberapa kemajuan ekonomi telah dicapai, terutama di daerah pedesaan yang didominasi oleh Kanak, perpecahan etnis dan politik tetap sangat dalam. Perpecahan antara pendukung dan penentang kemerdekaan semakin menguat setelah referendum kedua mengindikasikan pergeseran menuju kemerdekaan, dengan referendum ketiga yang direncanakan pada 2021 menjadi titik kunci berikutnya dalam proses ini.

Penelitian keempat merupakan penelitian dari Lee Duffield yang berjudul "*The New Caledonia Independence Referendum*" (Duffield, 2019). Penelitian Duffield membahas referendum kemerdekaan Kaledonia Baru dan konteks sejarah serta politik yang melatarbelakangi referendum tersebut. Penulis meneliti bagaimana Prancis mengambil alih Kaledonia Baru pada tahun 1853 dan bagaimana konflik kolonial yang pahit masih mempengaruhi situasi Kaledonia Baru hingga saat ini. Penelitian ini menyoroti peran negara Prancis sebagai arbitrator sekaligus peserta dalam proses ini, serta hubungan antara masyarakat pribumi Kanak, warga Prancis Eropa (*Caldoche*), dan komunitas etnis lainnya. Penelitian Duffield juga membahas isu-isu penting seperti eksploitasi kolonial, peran industri nikel yang besar, serta imigrasi yang menyebabkan masyarakat Kanak menjadi minoritas. Selain itu, penelitian Duffield mengeksplorasi bagaimana pergantian pemerintah sayap kiri dan kanan di Prancis memengaruhi kebijakan terkait kemerdekaan Kaledonia Baru, serta bagaimana pengalaman kerja sama selama 30 tahun dalam kerangka Perjanjian Matignon telah meningkatkan peluang mencapai hasil positif.

Penelitian kelima merupakan penelitian dari Matthias Kowasch, Severine Bouard, Simon Batterbury, dan Wadrawane Eddie Wayuone yang berjudul "*The Third Independence Referendum in New Caledonia – a Fallback to Colonialism?*" (Pädagogische et al., 2020). Penelitian

Kowasch dkk membahas referendum ketiga di Kaledonia Baru yang berlangsung pada 12 Desember 2021, yang menjadi bagian dari proses dekolonisasi wilayah Kaledonia Baru dari Prancis. Meskipun hasil referendum menunjukkan 96,5 persen suara menolak kemerdekaan, penulis berpendapat bahwa referendum ini tidak demokratis karena tidak menghormati tradisi budaya Kanak dan diadakan di tengah masa berkabung yang penting bagi komunitas tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 menghambat kampanye politik di kalangan pendukung kemerdekaan, yang mayoritas berasal dari etnis Kanak, sehingga banyak dari kelompok pro-kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Penelitian ini juga mencatat bahwa, meskipun referendum tersebut sah secara hukum, hasilnya tidak mencerminkan kehendak masyarakat adat Kanak. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan boikot referendum oleh pendukung kemerdekaan dan merekomendasikan bentuk kemitraan baru antara Prancis dan Kaledonia Baru sebagai solusi untuk melanjutkan proses dekolonisasi.

Penelitian keenam merupakan penelitian dari Matthew Connelly dalam artikel yang berjudul “*A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era*” (Connelly, 2002). Artikel ini membahas bagaimana Front de Libération Nationale (FLN) Aljazair menggunakan strategi diplomasi global, termasuk memanfaatkan PBB dan dukungan negara-negara non-blok, untuk mengalahkan dominasi kolonial Prancis, meskipun militer FLN relatif lemah. Connelly berargumen bahwa kekalahan Prancis adalah hasil dari kerentanan strategis yang berasal dari kebijakan kolonialnya sendiri dan ketegangan dalam aliansi Barat selama Perang Dingin. Dukungan yang enggan dari Amerika Serikat, tekanan internasional, dan ketidakmampuan Prancis untuk menghadapi tantangan transnasional turut mempercepat kemerdekaan Aljazair. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan konflik sebagai peristiwa lokal, tetapi juga mengkontekstualisasikan revolusi tersebut sebagai bagian dari perubahan global menuju tatanan baru, di mana kedaulatan negara-negara kolonial mulai dipertanyakan dan norma

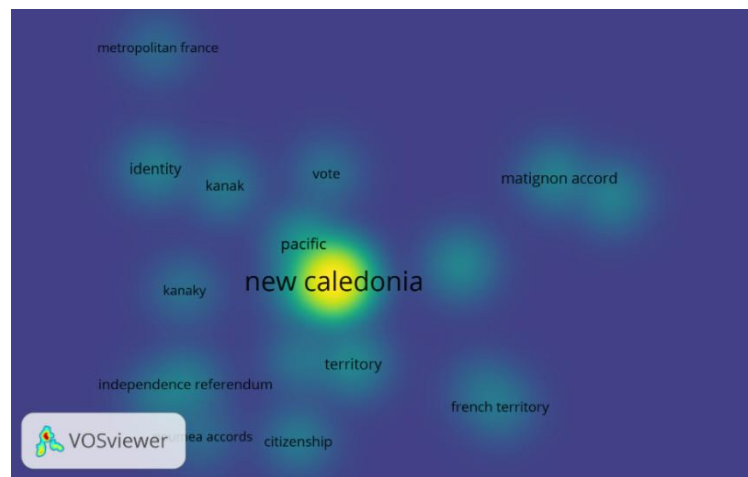
diplomasi internasional berkembang.

Penelitian ketujuh merupakan penelitian dari Christopher R. W. Dietrich dengan artikel jurnal yang berjudul “*Strategies of Decolonization: Economic Sovereignty and National Security in Libyan-US Relations, 1949–1971*” (Dietrich, 2022). Dietrich membahas hubungan Libya dan AS pada masa dekolonisasi dengan fokus pada kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Libya, setelah meraih kemerdekaan, menggunakan kedaulatannya untuk menegosiasikan hak-hak terkait pangkalan militer dan minyak dengan AS dan perusahaan multinasional. Strategi Libya mencakup pemanfaatan kompetisi korporasi dan dukungan dari negara-negara penghasil minyak lainnya melalui organisasi seperti PBB, Liga Arab, dan OPEC dengan menyoroti pentingnya hukum perminyakan Libya tahun 1955 yang mendorong reformasi ekonomi dan memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam. Libya berhasil mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui lelang kompetitif, pajak, dan revisi kontrak minyak. Di sisi lain, AS mengakomodasi kebijakan ini demi menjaga akses strategis ke pangkalan militer di Wheelus dan memastikan pasokan minyak selama Perang Dingin. Hubungan ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara kedaulatan negara pasca-kolonial, politik global, dan kepentingan ekonomi pada abad ke-20.

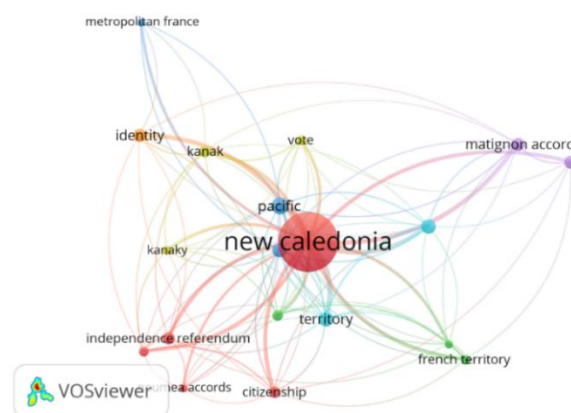
Untuk memperoleh unsur kebaruan, penulis memanfaatkan dua aplikasi yang mendukung penyusunan penulisan ini, yaitu Publish or Perish yang berfungsi untuk mengumpulkan metadata, dan VosViewer yang digunakan untuk mengolah metadata tersebut. Proses pengolahan dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik sesuai dengan topik yang akan dianalisis, yakni New Caledonia, New Caledonian Independence Referendum, French, dan National Interest. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, penulis berhasil mengumpulkan 500 karya akademik, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan.

Dengan mengolah metadata tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat sedikit penelitian yang membahas Kaledonia Baru dan referendum

kemerdekaannya. Maka, penulis berkeyakinan bahwa topik ini memerlukan analisis yang lebih komprehensif dan mendetail. Hal ini dikarenakan kompleksitas isu yang diangkat, yang mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan mendalami pembahasan ini, diharapkan dapat mengungkap nuansa dan dimensi yang mungkin belum tersorot, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tema yang sedang dikaji. Pendekatan yang lebih mendalam juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta memberikan wawasan yang lebih jelas untuk solusi yang mungkin diusulkan. Berikut hasil pengolahan data VosViewer:



Gambar 2. 1 Hasil Pengolahan Data VosViewer (Density)



Gambar 2. 2 Hasil Pengolahan Data VosViewer (Network)

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Teori Dekolonisasi

Dekolonisasi merupakan proses transisi politik di mana suatu wilayah atau negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial memperoleh kedaulatan penuh. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga mencakup perubahan ekonomi serta sosial dan budaya dalam rangka membangun pemerintahan yang mandiri. Roland Burke dalam *Decolonization and the Evolution of International Human Rights* (Burke, 2010) menjelaskan bahwa dekolonisasi tidak hanya terjadi melalui konflik bersenjata atau revolusi, tetapi juga dapat dicapai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Burke menyoroti bagaimana hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) menjadi prinsip utama dalam proses dekolonisasi, sebagaimana diakui dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi 1514 (XV) tahun 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial. Resolusi ini menjadi landasan hukum bagi berbagai perjuangan dekolonisasi di seluruh dunia, termasuk bagi Kaledonia Baru, yang masih berada dalam status Non-Self-Governing Territory (NSGT) di bawah pengawasan PBB.

Dalam isu di Kaledonia Baru, teori Burke dapat digunakan untuk memahami bagaimana kelompok FLNKS berupaya mencapai dekolonisasi melalui strategi internasionalisasi isu. FLNKS tidak hanya mengandalkan referendum sebagai mekanisme demokratis, tetapi juga membawa isu ini ke berbagai forum internasional guna mendapatkan dukungan politik dan hukum dari komunitas global. Kekuatan utama atau *power* dari FLNKS dalam mengangkat isu dekolonisasi terletak pada legitimasi politiknya sebagai perwakilan resmi masyarakat Kanak, yang merupakan penduduk asli Kaledonia Baru dan memiliki hak atas penentuan nasib sendiri sebagaimana dijamin oleh hukum

internasional. Selain itu, dukungan dari negara-negara ras Melanesia seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan Fiji juga memperkuat posisi FLNKS dalam diplomasi internasional, karena mereka menganggap perjuangan suku Kanak sebagai bagian dari identitas bersama Melanesia.

Di tingkat internasional, peran United Nations Special Committee on Decolonization (C-24) menjadi salah satu faktor *enabler* utama yang sehingga isu dekolonisasi Kaledonia Baru tetap relevan di forum global. C-24 bertugas mengawasi perkembangan wilayah-wilayah yang belum merdeka dan secara rutin menekan Prancis agar memberikan ruang lebih besar bagi proses penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru. Selain itu, Melanesian Spearhead Group (MSG) memiliki kekuatan dalam membangun blok politik kawasan yang secara aktif mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru. MSG bahkan mengakui FLNKS sebagai anggota resmi, memberikan mereka fasilitas resmi untuk mengadvokasi kemerdekaan di tingkat regional. Pacific Islands Forum (PIF), sebagai organisasi yang lebih luas di kawasan Pasifik, juga memainkan peran dalam menjaga stabilitas kawasan sambil mendorong dialog antara FLNKS dan Prancis.

Di luar aktor kawasan, muncul juga peran Baku Initiative Group (BIG) sebagai aktor government organization (GO) yang berfungsi dalam fasilitasi diplomasi dan advokasi. BIG berperan dalam memberikan fasilitas internasional bagi kelompok pro-kemerdekaan untuk mengangkat isu Kaledonia Baru di luar lingkup Pasifik, sehingga meningkatkan tekanan terhadap Prancis dalam forum global. Australia, meskipun memiliki hubungan erat dengan Prancis, tetap terlibat dalam dialog politik dengan FLNKS untuk menjaga stabilitas regional dan memastikan bahwa setiap proses politik berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum internasional.

Teori dekolonisasi yang dikembangkan oleh Burke juga menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan dekolonisasi sangat bergantung pada strategi diplomasi dan legalitas internasional yang

digunakan untuk menekan kekuatan kolonial agar mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah jajahan. Dalam kasus Kaledonia Baru, keterlibatan aktor internasional bukan hanya terjadi karena inisiatif FLNKS semata, tetapi juga karena kepentingan strategis dari negara-negara kawasan dan organisasi internasional dalam memastikan bahwa proses dekolonisasi berlangsung secara damai dan sah di mata hukum internasional. Dengan demikian, teori dekolonisasi dalam penelitian ini tidak hanya menyoroti perjuangan politik lokal, tetapi juga bagaimana kekuatan aktor internasional, baik negara maupun organisasi multilateral, berkontribusi dalam mengangkat isu dekolonisasi Kaledonia Baru sebagai bagian dari dinamika global.

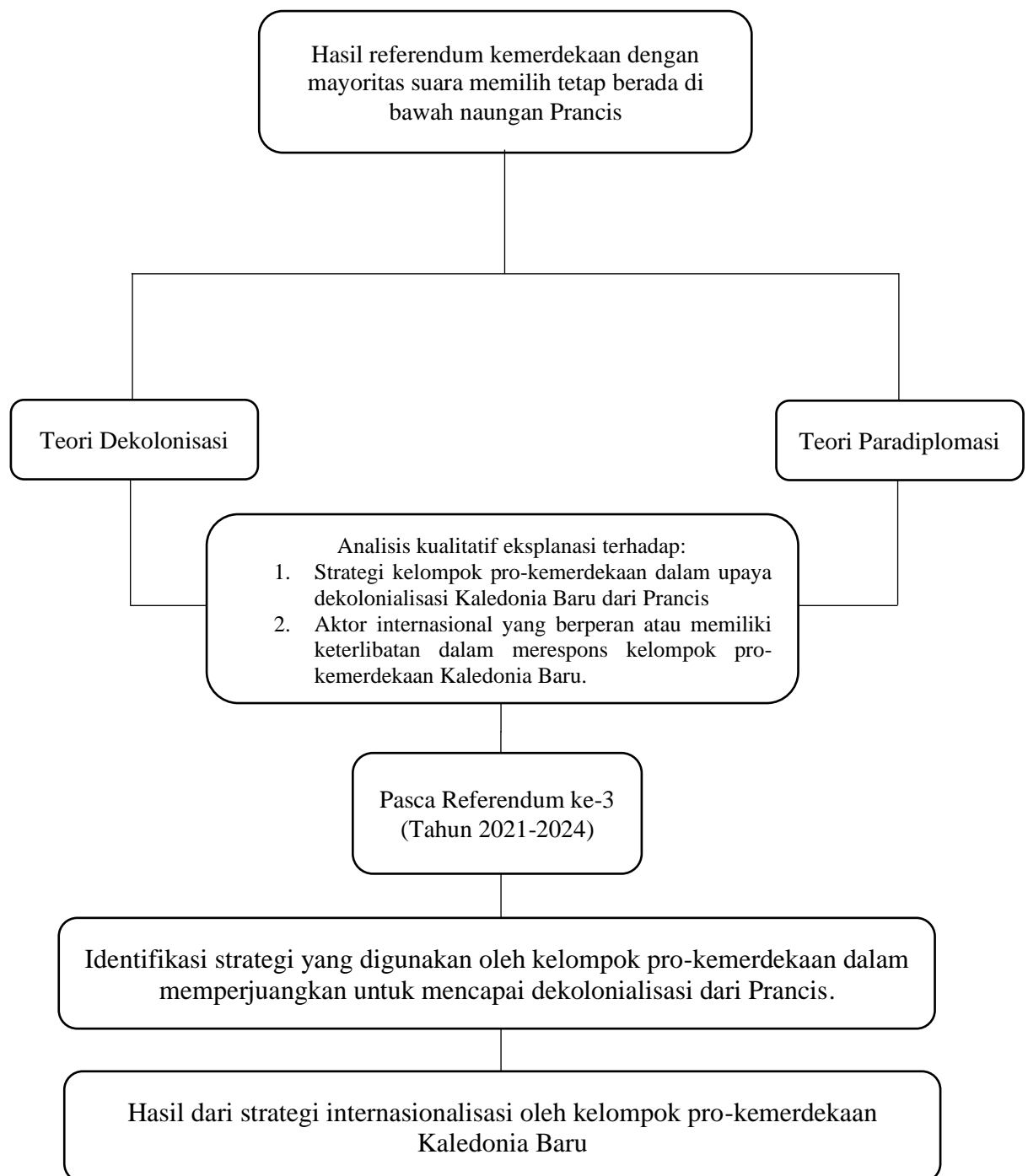
2.2.2 Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah bentuk keterlibatan pemerintah daerah atau aktor subnasional dalam urusan internasional secara langsung, tanpa selalu melalui otoritas negara pusat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Ivo Duchacek, yang menyatakan bahwa entitas non-pusat memiliki kapasitas untuk menjalankan aktivitas luar negeri secara mandiri demi kepentingan lokal mereka sendiri (Duchacek, 1984). Pada dasarnya, paradiplomasi merefleksikan desentralisasi kebijakan luar negeri dalam konteks globalisasi, di mana identitas lokal dan kepentingan regional mulai mengambil peran dalam ranah hubungan internasional. Salah satu bentuk yang berkembang dari teori ini adalah Paradiplomasi Porto, yang muncul di Amerika Latin, khususnya dari praktik kota Porto Alegre, Brasil, dalam menjalankan hubungan luar negeri berbasis partisipasi akar rumput dan resistensi terhadap pusat kekuasaan. Teori ini dikembangkan oleh para akademisi seperti Carlos Aurelio Pimenta de Faria dan Rafael Duarte Villa, yang melihat bahwa aktor subnasional tidak hanya berperan dalam kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi juga secara aktif menginternasionalisasi isu-isu identitas, marginalisasi politik, hingga kemerdekaan (Rodrigues, 2021).

Paradiplomasi Porto berbeda dari pendekatan paradiplomasi biasa karena lebih menitikberatkan pada upaya advokasi politik dan emansipasi subnasional, termasuk melalui diplomasi informal, jaringan transnasional, kerja sama antarwilayah, serta keterlibatan dengan organisasi internasional dan LSM global. Dalam konteks ini, aktor lokal tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat, melainkan agen aktif yang memperjuangkan kepentingan politiknya di tingkat global (Lecours, 2008). Paradiplomasi Porto menjadi sangat relevan dalam kerangka skripsi ini, yang membahas tentang upaya internasionalisasi isu kemerdekaan oleh aktor lokal, seperti yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. Dalam kasus tersebut, kelompok lokal seperti FLNKS melakukan komunikasi aktif dengan organisasi regional seperti MSG, serta menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik dan lembaga internasional seperti PBB. Ini merupakan contoh nyata dari bagaimana paradiplomasi Porto beroperasi: yakni ketika aktor lokal secara strategis mengangkat isu kemerdekaan mereka ke panggung internasional untuk memperoleh legitimasi politik, dukungan moral, dan pengakuan global (Rodrigues, 2021). Dengan demikian, teori ini memberikan lensa yang kritis untuk memahami bagaimana dinamika hubungan pusat-daerah tidak lagi terbatas dalam batas domestik, tetapi sudah terhubung langsung ke jaringan global yang lebih luas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran untuk membantu membangun pola pikir dan menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan terkait strategi dekolonisasi Kaledonia Baru oleh kelompok pro-kemerdekaan.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis eksplanatif untuk menganalisis bagaimana strategi yang dikerahkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru demi mencapai dekolonisasi dari Prancis.

Metode pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam penjelasan yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi langsung, studi literatur, serta wawancara dengan partisipan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diselaraskan dengan teori atau konsep yang relevan dengan tujuan menghasilkan pemahaman atau prediksi yang menjawab permasalahan tersebut. Namun, penulis hanya akan menggunakan studi literatur dalam penelitian kualitatif analisis eksplanatif.

Penelitian kualitatif berfokus pada penggalian makna dan konteks yang lebih luas dari suatu fenomena, bukan hanya sekadar mengukur aspek-aspek kuantitatif, melainkan memahami bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi dalam kehidupan nyata (Creswell, 2014). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan analisis, penulis merujuk pada konsep dan teori yang relevan, dan memperkuatnya dengan data empiris yang dikumpulkan. Metode penelitian ini mencakup observasi terhadap dokumen, transkrip wawancara, serta penghubungan antara teori dan konsep dengan fenomena kasus (Neuman, 2014) yang dikaji.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap sesuai dengan konteks yang relevan. Fokus ini dirancang untuk membantu penulis menganalisis objek penelitian secara lebih sistematis dan mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi strategi dari aktor lokal terutama kelompok pro-kemerdekaan dalam upaya dekolonisasi dari Prancis.

Dalam penelitian ini, teori yang membantu penulis untuk menguraikan fokus adalah teori dekolonisasi yang akan membantu menganalisis strategi dari aktor lokal untuk mencapai kebebasan. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan teori paradiplomasi terkhusus pada paradiplomasi porto untuk menganalisis upaya dari kelompok pro-kemerdekaan untuk bernegosiasi untuk membantu menangani isu ketidakadilan yang Kaledonia Baru terima dari sisi pro-kemerdekaan.

3.3 Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder yang menyediakan perspektif yang komprehensif mengenai strategi internasionalisasi kelompok pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. Sumber primer mencakup wawancara dengan pakar, diplomat, dan ahli yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mendapati wawancara mendalam dengan Bapak Patrick Hasjim, seorang diplomat perwakilan KJRI di Noumea dengan fungsi penerangan.

Data sekunder dalam penelitian mencakup beragam literatur tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder terkait referendum kemerdekaan Kaledonia Baru. Sumber data lainnya berasal dari portal berita daring yang kredibel, baik yang menyajikan informasi terkini maupun historis, seperti BBC, CNN, Aljazeera, The Guardian, The United

States Institute of Peace (USIP), The Diplomat, Eurac, Lemonde, Les Nouvelles Caledonniennes (LNC), dan Radio New Zealand (RNZ).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data primer dengan metode snowball. Metode sampling ini memiliki skema yakni responden pertama yang dihubungi merekomendasikan atau merujuk penulis kepada responden lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang disusun. Pada penelitian ini, penulis menghubungi Ibu Pinkan Ovanita Tulung selaku perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) dalam fungsi ekonomi, lalu Ibu Pinkan merujuk penulis pada Bapak Patrick Hasyim selaku perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) dalam fungsi penerangan.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder dengan metode kajian pustaka dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur, berita, serta dokumen yang relevan dengan referendum kemerdekaan Kaledonia Baru. Melalui metode kajian pustaka, penulis akan menyaring dan mengategorikan literatur, berita, serta dokumen sesuai dengan topik penelitian, kemudian merangkum dan menginterpretasikannya secara sistematis dalam tulisan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan teknik kondensasi data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) serta pendekatan triangulasi data dari Bryman (Bryman, 2016), yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai setelah seluruh data sekunder terkumpul, mengingat pada tahap awal penelitian, akses terhadap data primer masih terbatas. Oleh karena itu,

langkah awal analisis difokuskan pada pengelolaan data sekunder melalui proses penyederhanaan, seleksi, dan pemilahan data yang paling relevan dengan fokus penelitian.

Tahap pertama dalam analisis melibatkan penyusunan data menjadi narasi yang terstruktur guna membangun subbab 4.1, yang berisi gambaran umum Kaledonia Baru, serta subbab 4.2, yang membahas dinamika upaya dekolonisasi wilayah tersebut. Dalam proses ini, penulis melakukan telaah ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kronologi dan konteks historis sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Kaledonia Baru. Selanjutnya, setelah memperoleh data primer melalui metode snowball sampling, penulis melakukan kondensasi data dengan menyajikannya dalam bentuk rangkuman analisis yang digunakan untuk menyusun subbab 4.3, yang membahas strategi internasionalisasi kelompok pro-kemerdekaan, serta subbab 4.4, yang menguraikan respons Prancis terhadap strategi internasionalisasi tersebut.

Untuk menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teoritis, penulis kemudian menganalisis strategi yang diterapkan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam kaitannya dengan teori dekolonisasi. Hasil analisis ini dituangkan dalam subbab 4.5, yang berjudul analisis internasionalisasi Berdasarkan teori dekolonisasi. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui interpretasi terhadap temuan yang telah dianalisis, dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Guna memastikan validitas serta konsistensi hasil penelitian, penulis menerapkan teknik triangulasi data dengan menggabungkan berbagai sumber, termasuk analisis data sekunder, transkrip wawancara, serta rangkuman temuan utama. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan akurasi interpretasi, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika dekolonisasi Kaledonia Baru.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru dalam upaya mewujudkan dekolonisasi dari Prancis. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjuangan kelompok pro-kemerdekaan tidak hanya terbatas pada dinamika politik domestik, tetapi juga melibatkan interaksi dengan aktor internasional guna mendapatkan legitimasi dan dukungan atas hak penentuan nasib sendiri. Upaya internasionalisasi ini diwujudkan melalui advokasi di forum internasional seperti PBB, PIF, dan MSG, serta adanya dorongan kuat dari media-media lokal seperti LNC, regional seperti RNZ, dan media-media global lainnya yang turut menyoroti isu dekolonisasi di Kaledonia Baru. Dalam konteks dekolonisasi, strategi kelompok pro-kemerdekaan mencerminkan transisi dari dominasi kolonial menuju kedaulatan penuh, yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor serta negosiasi dalam tatanan politik global.

Namun, hasil tiga kali referendum menunjukkan bahwa mayoritas suara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan preferensi politik masyarakat Kaledonia Baru, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang berakar dalam kolonialisme, seperti perubahan demografi akibat migrasi, dominasi ekonomi oleh kelompok loyalis, serta intervensi administratif Prancis yang mempengaruhi jalannya referendum. Hal ini menegaskan bahwa dekolonisasi bukan hanya proses hukum dan politik, tetapi juga negosiasi multilateral yang kompleks, di mana berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan geopolitik turut menentukan hasil akhir.

Dalam kerangka hubungan internasional kontemporer, penting untuk memahami bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam sistem global. Realitas ini tercermin dalam kasus Kaledonia Baru, di mana kelompok pro-kemerdekaan memanfaatkan dukungan dari *non-state actors*, *state actors*, dan jaringan masyarakat sipil transnasional untuk menyuarkan aspirasinya di tingkat internasional. Keterlibatan aktor-aktor ini mencerminkan pergeseran paradigma hubungan internasional yang semakin inklusif, di mana suara-suara dari entitas subnasional seperti komunitas adat, pemerintah daerah, atau kelompok etnopolitik dapat memperoleh ruang dalam arena global. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penghubung yang menjembatani aspirasi lokal dengan struktur global melalui advokasi hingga partisipasi dalam forum-forum internasional.

Oleh karena itu, strategi internasionalisasi yang diterapkan oleh kelompok pro-kemerdekaan dapat dipahami sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang menghambat realisasi penuh hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Kanak sebagai penduduk asli Kaledonia Baru. Meskipun strategi ini berhasil meningkatkan kesadaran global terhadap situasi politik Kaledonia Baru, intervensi Prancis tetap menjadi faktor utama yang membatasi efektivitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi dari kolonialisme ke kedaulatan penuh tidak selalu berlangsung secara linear. Dekolonisasi bukan hanya persoalan hukum atau administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik yang lebih luas. Oleh karena itu, perjuangan kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru tidak hanya bergantung pada strategi politik internal, tetapi juga memerlukan pendekatan negosiasi multilateral yang memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada dukungan eksternal. Faktor internal, seperti kesatuan politik kelompok pro-kemerdekaan, kesadaran kolektif masyarakat Kanak, dan stabilitas ekonomi, tetap menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan upaya dekolonisasi. Dengan demikian,

strategi internasionalisasi ke depan harus diiringi dengan penguatan kapasitas internal guna menciptakan momentum politik yang lebih solid dalam mencapai tujuan kemerdekaan, dengan tetap melibatkan jaringan global sebagai sarana legitimasi dan pengaruh di panggung internasional.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi para pemangku kepentingan dalam proses dekolonisasi Kaledonia Baru. Pertama, bagi kelompok pro-kemerdekaan, perlu dilakukan penguatan strategi diplomasi dengan lebih menekankan pendekatan berbasis koalisi di tingkat internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Pasifik serta organisasi internasional yang memiliki visi serupa terkait hak penentuan nasib sendiri. Selain itu, kelompok pro-kemerdekaan juga perlu memperluas advokasi mereka ke dalam ranah ekonomi dan sosial untuk menunjukkan kesiapan institusional dalam menghadapi transisi menuju negara merdeka.

Kedua, bagi pemerintah Prancis, perlu adanya komitmen yang lebih besar dalam menjamin bahwa proses referendum dan perundingan masa depan dilakukan secara inklusif dan tidak memihak. Hal ini mencakup penghapusan kebijakan yang berpotensi memperlemah posisi politik masyarakat Kanak, serta pembukaan ruang negosiasi yang lebih setara bagi kelompok pro-kemerdekaan. Sebagai aktor kolonial yang memiliki kendali atas berbagai aspek pemerintahan di Kaledonia Baru, Prancis memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan status politik wilayah tersebut dilakukan dalam kerangka demokrasi yang sesungguhnya.

Ketiga, bagi komunitas internasional, terutama organisasi yang bergerak dalam isu dekolonisasi dan hak asasi manusia, perlu adanya langkah yang lebih konkret dalam memberikan dukungan bagi perjuangan politik masyarakat Kanak. Mekanisme pemantauan terhadap kebijakan

Prancis di Kaledonia Baru harus diperkuat, dan tekanan diplomatik perlu ditingkatkan agar proses negosiasi antara pihak pro-kemerdekaan dan pemerintah Prancis dapat berlangsung dalam kondisi yang lebih adil.

Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi preferensi politik masyarakat Kaledonia Baru. Selain itu, kajian mengenai dampak kebijakan Prancis terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pribumi Kanak pasca-referendum ketiga juga menjadi aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas dekolonisasi sebagai suatu proses yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga melibatkan dinamika global yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Armbruster, S. (2024). *UN experts 'alarmed' by New Caledonia deaths as Pacific fact-finding mission readies*.
<https://www.benarnews.org/english/news/pacific/un-france-caledonia-10242024204625.html>
- Australian Government. (2024a). *New Caledonia Country Brief*.
<https://www.dfat.gov.au/geo/new-caledonia/new-caledonia-country-brief>
- Australian Government. (2024b). *Wallis and Futuna country brief*.
<https://www.dfat.gov.au/geo/wallis-and-futuna/wallis-and-futuna-country-brief>
- Australian Indigenous Law Reporter. (2002). *Agreement on New Caledonia (Noumea Accord)*. www.peaceagreements.org
- Azertac. (2024a). *Baku Initiative Group and 14 movements fighting for independence in France's recent colonies issue statement expressing support for New Caledonia*.
https://azertag.az/en/xeber/baku_initiative_group_and_14_movements_fighting_for_independence_in_france_039s_recent_colonies_issue_statement_expressing_support_for_new_caledonia__video-3005094
- Azertac. (2024b). *Geneva hosts Conference on outcomes of French colonization*.
https://azertag.az/en/xeber/geneva_hosts_conference_on_outcomes_of_french_colonization-3241028
- Baku Initiative Group. (2024). *BIG Cooperation*.
<https://bakuinitiative.com/cooperation>
- BBC News. (2024). *More French police arrive in New Caledonia amid riots*.
<https://www.bbc.com/news/articles/cyj348wwggzo>
- Bencivengo, Y. (2014). Naissance de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie et au-delà, à l'interface des trajectoires industrielles, impériales et coloniales (1875-1914). *Journal de La Societe Des Oceanistes*, 138–139(1), 137–149.
<https://doi.org/10.4000/jso.7144>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.

- Burke, R. (2010). *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*. University of Pennsylvania Press.
- Cain, T. N. (2013). *Why the Melanesian Spearhead Group is a success*. <http://www.devpolicy.org>
- Chappell, D. A. (1999). The Noumea Accord: Decolonization without Independence in New Caledonia? In *Source: Pacific Affairs* (Vol. 72, Issue 3).
- Chrisafis, A. (2024). *Macron to visit New Caledonia to 'set up mission' after deadly riots*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/21/new-caledonia-riots-state-of-emergency-noumea-australia-new-zealand-evacuation-flights>
- Connell, J. (2021). The 2020 New Caledonia Referendum: The Slow March to Independence? *Journal of Pacific History*, 56(2), 144–160. <https://doi.org/10.1080/00223344.2021.1912584>
- Connelly, M. (2002). *A diplomatic revolution : Algeria's fight for independence and the origins of the post-cold war era*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Darnault, I. J. (2024). *New Caledonia: France will continue its cooperation with the United Nations and the C24*. <https://onu.delegfrance.org/new-caledonia-france-will-continue-its-cooperation-with-the-united-nations-and>
- Decloitre, P. (2024). *New Caledonia's Congress president: Azerbaijan deal "null and void."* RNZ. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/530915/new-caledonia-s-congress-president-azerbaijan-deal-null-and-void>
- Dietrich, C. R. W. (2022). Strategies of Decolonization: Economic Sovereignty and National Security in Libyan-US Relations, 1949-1971. *Journal of Global History*, 17(1), 69–88. <https://doi.org/10.1017/S1740022821000140>
- Duchacek, I. D. (1984). The International Dimension of Subnational Self-Government. *Publius: The Journal of Federalism*, 14(4), 5–31. <https://academic.oup.com/publius/article-abstract/14/4/5/1894236?redirectedFrom=fulltext>
- Duffield, L. (2019). The New Caledonia independence referendum: What happens now? *Pacific Journalism Review*, 25(1 & 2), 65–80.
- Dziedzic, S., & Oaten, J. (2024). *PALM meeting between Pacific leaders and Japan wraps up with focus on troubled New Caledonia*.

- Farhadova, A. (2024). *New Caledonia annuls cooperation agreement with Azerbaijan*. OC Media. <https://oc-media.org/new-caledonia-annuls-cooperation-agreement-with-azerbaijan>
- Fisher, D. (2013). *France in the South Pacific Power and Politics*.
- Fisher, D. (2018). *New Caledonia's independence referendum: a reminder of realities*. 2018. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/new-caledonia-s-independence-referendum-reminder-realities>
- Fisher, D. (2024a). New Caledonia's Self-Determination Process. In *Geographies of New Caledonia-Kanaky*.
- Fisher, D. (2024b). New Caledonia's Self-Determination Process. In *Geographies of New Caledonia-Kanaky*.
- Glebbeeck, P. (1990). *The South Pacific Nuclear Free Zone Treaty: A Lost Battle The Superpowers*.
- Government of New Caledonia. (2018). *Résultats de la consultation des électeurs de la Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2018*. <https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Locales/Resultats-de-la-consultation-des-electeurs-de-la-Nouvelle-Calédonie-du-4-novembre-2018/?nomobredirect=true>
- Green, C. (2023). *Re-Collecting Kanaky: The Power of The Past in the Independence Politics of Kanaky/New Caledonia*.
- Guibert, P. N. (2024). *Nouvelle-Calédonie : les indépendantistes invités par l'Azerbaïdjan suscitent de nouveau la réprobation*. Le Monde. https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/07/18/nouvelle-caledonie-les-independantistes-invites-par-l-azerbaïdjan-suscitent-de-nouveau-la-reprobation_6252084_823448
- Hasjim, P. (2024). *Population de la Nouvelle-Calédonie selon la communauté d'appartenance, aux différents recensements Communauté d'appartenance*.
- Hasjim, P. (2025). *Wawancara mendalam bersama Bapak Patrick Hasjim, perwakilan KJRI di Noumea*.
- Jansen, J. C. ., Osterhammel, J., & Riemer, Jeremiah. (2019). *Decolonization : a short history*. PUP.
- Job, N. (2024). *Why an approved constitutional amendment in New Caledonia led to deadly violence in the French overseas territory*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2024-05-20/new-caledonia-riots-explained/103866440>

- Johnson, B., & Ziogas, A. (2024). *Pacific family deserves Australia's backing on New Caledonia*. <https://www.aspistrategist.org.au/pacific-family-deserves-australias-backing-on-new-caledonia/>
- La, D. E., & Française, R. (1958). *Lois Et Decrets: Arretes, Circulaires, Avis, Communications, Informations Et Annonces*. <https://www.legifrance.gouv.fr/download/secure/file/a23x5YVsbYgETf4F@QRp#page=1>
- Lecours, A. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*. <https://www.kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/paradiplomacylessonsfromthe.pdf>
- Les Nouvelles Calédoniennes. (2021a). *Le changement de méthode de Lecornu agace les indépendantistes*. <https://www.lnc.nc/article/politique/referendum/nouvelle-caledonie/le-changement-de-methode-de-lecornu-agace-les-independantistes>
- Les Nouvelles Calédoniennes. (2021b). *L'État présente les conséquences en cas de victoire du Oui*. <https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/politique/pdf-l-etat-presente-les-consequences-en-cas-de-victoire-du-oui?uid=&success=1>
- Les Nouvelles Calédoniennes. (2021c). *Quel avenir veulent les habitants de Calédonie?* <https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/societe/politique/quel-avenir-veulent-les-habitants-de-caledonie>
- Lois, E. T., & Decrets. (1998). *Sommaire General: Sommaire Analytique Page Suivante. Republique Francaise Journal Officiel*.
- Maclellan, N. (2021). *Third time lucky in New Caledonia?* <https://insidestory.org.au/third-time-lucky-in-new-caledonia/>
- Maclellan, N. (2022). *Forum mission questions credibility of New Caledonia referendum*. <https://islandsbusiness.com/news-break/pif-new-caledonia/>
- Maclellan, N. (2024). *MSG calls on France to allow monitoring missions into New Caledonia*. Island Business. https://islandsbusiness.com/breaking-news/msg-new-caledonia/?utm_source=chatgpt.com
- Macqueen, N. (1989). *SHARPENING THE SPEARHEAD: SUBREGIONALISM IN MELANESIA*.
- Mampioer, D. A. (2024a). *36 tahun MSG, perjalanan kerja sama dan kemajuan*. https://jubi.id/pasifik/2024/36-tahun-msg-perjalanan-kerja-sama-dan-kemajuan/?utm_source=chatgpt.com

- Mampioer, D. A. (2024b). *Forum Kepulauan Pasifik Masih Menunggu Izin dari Prancis untuk Misi ke Kaledonia Baru*. <https://jubi.id/pasifik/2024/forum-kepulauan-pasifik-masih-menunggu-izin-dari-prancis-untuk-misi-ke-kaledonia-baru/>
- Melanesian Spreadhead Group. (2020). *MSG Secretariat and FLNKS discuss progress about referendum 2020*. <https://msgsec.info/msg-secretariat-and-flnks-discuss-progress-of-2020-work-programme-implementation/>
- Migiro, G. (2018). *Countries with the Largest Exclusive Economic Zones*. World Atlas. <https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-exclusive-economic-zones.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2024). UN-Handbook-2024-25. In *New Zealand Government*. New Zealand Government.
- Muchamad, N. (2018). *Kanaky-New Caledonia: A Referendum Against French Settler Colonialism*. The Funambulist. <https://thefunambulist.net/magazine/space-of-ableism/kanaky-new-caledonia-referendum-french-settler-colonialism>
- Nangoi, R. (1983). Australia dan Kawasan Pasifik Selatan. *Analisa 1983*. <https://journals.csis.or.id/index.php/analisa/article/download/382/1135/2273>
- NC la 1ère. (2021). “*Cette affaire de date, ce n’est pas un camp contre un autre !*” : *entretien avec le ministre des Outre-mer sur le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie*. <https://la1ere.francetvinfo.fr/cette-affaire-de-date-ce-n-est-pas-un-camp-contre-un-autre-entretien-avec-le-ministre-des-outre-mer-sur-l-avenir-de-la-nouvelle-caledonie-1024501.html>
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Basics of social research: qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education Limited.
- Pacific Island Forum. (2022). *PACIFIC ISLANDS FORUM MINISTERIAL COMMITTEE TO NEW CALEDONIA REPORT ON THE 2021 NEW CALEDONIA INDEPENDENCE REFERENDUM EXECUTIVE SUMMARY*.
- Pacific Island Forum. (2024). *RELEASE: Pacific Islands Forum Leaders endorse high-level mission to New Caledonia*. <https://forumsec.org/publications/release-pacific-islands-forum-leaders-endorse-high-level-mission-new-caledonia>
- Pädagogische, M. K., Steiermark, H., Batterbury, S., Bouard, S., & Wayuone, W. E. (2020). *The third independence referendum in New Caledonia-a fallback to colonialism?* <https://doi.org/10.23791/571115>

- Pajon, C. (2024). *What type of cooperation with the Pacific Islands? Japan and France's visions after the 10th PALM Summit in Tokyo*. <https://www.ifri.org/en/what-type-cooperation-pacific-islands-japan-and-frances-visions-after-10th-palm-summit-tokyo>
- Pantz, P. C. (2024). *Can PIF help resolve the conflict in New Caledonia?* <https://doi.org/10.54377/a8eb-55cc>
- Reuters. (2024). *Pacific delegation says collaboration needed in troubled New Caledonia*. https://www.reuters.com/world/pacific-leaders-say-collaboration-needed-troubled-new-caledonia-2024-10-30/?utm_source=chatgpt.com
- Rodrigues, G. M. A. (2021). *Paradiplomacia-cidades e estados na cena global (Editora Desatino, Série Elementos)*. <https://www.researchgate.net/publication/353623045>
- Schimmelfennig, Frank., Winzen, Thomas., Lenz, Tobias., Rocabert, Jofre., Crasnic, Lorian., Gherasimov, Cristina., Lipps, Jana., & Mumford, Densua. (2021). *The Rise of International Parliaments Strategic Legitimation in International Organizations*. Oxford University Press USA - OSO.
- Skujins, A. (20204). *The New Caledonia riots are over, but what remains?* <https://www.euronews.com/2024/05/30/how-french-colonisation-set-new-caledonia-on-fire>
- Smith, E. (2022, July 26). *The future of New Caledonia following the third independence referendum: A French balancing act*. Eurac Research. <https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/the-future-of-new-caledonia-following-the-third-independence-referendum-a-french>
- Speedy, K. E. (2017). L'Ordre et la Morale: Looking Beyond the Transnational in a Non-indigenous Film About Recent Pacific History. *Sites: A Journal of Social Anthropology and Cultural Studies*, 14(2). <https://doi.org/10.11157/sites-vol14iss2id334>
- Tahana, J., & Blades, J. (2021). *MSG member states urged to push for postponed referendum*. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457565/msg-member-states-urged-to-push-for-postponed-referendum>
- The Milli Majlis Of The Azerbaijan Republic. (2024). *Milli Majlis of Azerbaijan, New Caledonian Congress Sign a Memorandum of Co-operation*. https://meclis.gov.az/news.php?id=1889&lang=en&utm_source=chatgpt.com
- Tutugoro, A. (2020). *Incompatible Struggles Reclaiming Indigenous Sovereignty*. 5.
- United Nations. (1945). *Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*.

United Nations. (1948). *United Nations Declarations of Human Rights*.

United Nations. (1960). *UNGA Resolution 1514 (XV)*.

United Nations General Assembly. (1970). *United Nations General Assembly Resolutions 2625*.

United Nations General Assembly. (2022). *77th session Agenda Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples Resolution adopted by the General Assembly on 12 December 2022*.

United Nations General Assembly. (2023). *78th session Agenda item 58 Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*.

Webster, Richard. A., & Nowell, Charles. E. (2024). *Western Colonialism: The French*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Western-colonialism/The-French>

Zweifel, W. (2023a). *New Caledonia's FLNKS wants ICJ advice on contested vote*. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/490978/new-caledonia-s-flnks-wants-icj-advice-on-contested-vote>

Zweifel, W. (2023b). *Pacific Islands Forum won't "intrude" in New Caledonia's decolonisation process*. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/490003/pacific-islands-forum-won-t-intrude-in-new-caledonia-s-decolonisation-process>